

Kepatuhan Implementasi SOP Sampah Di Kalurahan Tegaltirto Sebagai Dasar Tahap Pemeliharaan Dan Audit

Desy Eliana

Prodi Administrasi Kesehatan, Universitas Siber Muhammadiyah, Yogyakarta, Indonesia
Email: desy@sibermu.ac.id,

Abstract— Penelitian ini merupakan lanjutan dari studi sebelumnya mengenai pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah di Kalurahan Tegaltirto. Meskipun SOP telah disusun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya infrastruktur pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan SOP sebagai dasar tahap pemeliharaan dan audit guna memastikan efektivitasnya dalam jangka panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Sampel penelitian terdiri dari 40 responden yang mencakup pengelola BUMDes, petugas pengelola sampah, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat. Pembahasan dalam penelitian ini menekankan pentingnya audit berkala, peningkatan kapasitas petugas, serta edukasi berkelanjutan bagi masyarakat agar SOP dapat diterapkan secara konsisten. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemeliharaan dan audit terhadap SOP perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sampah yang lebih efektif. disarankan adanya peningkatan infrastruktur, penguatan regulasi, serta program edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap SOP pengelolaan sampah.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Implementasi SOP, Pemeliharaan, Audit,

I. LATAR BELAKANG

Menurut data capaian Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN, 2022) tentang pengurangan dan penanganan penimbunan sampah Rumah Tangga di Indonesia yang terdiri dari 164 kota/Kabupaten saat ini, diketahui bahwa terdapat timbunan sampah sebesar 19.451.900.89 ton sampah per tahunnya. Dimana diketahui hanya 50,8% (9.898. 994.18) ton Sampah per tahun yang ditangani. Hal ini sejalan dengan data yang diperoleh oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, disebutkan limbah plastik Indonesia mencapai 66 juta ton per tahun [1].

Krisis pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan serius di berbagai daerah, termasuk di Kota Yogyakarta. Hingga Juli 2024, Kota Yogyakarta mengalami darurat sampah dengan sekitar 5.000 ton sampah yang belum seluruhnya terangkut akibat keterbatasan sistem pengelolaan yang ada. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri, serta terbatasnya fasilitas pendukung seperti tempat pembuangan sementara dan infrastruktur pengolahan sampah. Situasi serupa juga terjadi di Kalurahan Tegaltirto,

yang masih menghadapi tantangan dalam implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemeliharaan dan audit berkala terhadap SOP yang telah disusun guna memastikan efektivitasnya dalam mengatasi permasalahan sampah dan menjaga keberlanjutan lingkungan [2].

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang menyumbangkan sampah terbesar di Provinsi DIY. Volume sampah yang dihasilkan di Sleman setiap tahun sebesar 57.757 ton (Harian Jogja, 2021)[3]. Berbagai upaya terkait permasalahan sampah juga telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman diantaranya adalah melakukan pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga melalui sosialisasi dan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana meliputi pengadaan kompartemen, komposer, mesin pencacah organik, 16 transfer depo, 28 truk sampah, 14 tempat Pembuangan Sampah Terpadu 3 R dan beberapa TPS yang tersebar di wilayah Sleman serta penegakkan Perda Sleman No.14/2007 tentang pengelolaan sampah. Namun hal ini belum meniadakan keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman.

Kalurahan Tegaltirto merupakan salah satu Kalurahan yang berada di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta. Secara geografis wilayah kalurahan Tegaltirto dan TPST Piyungan cukup dekat, yaitu kurang lebih sekitar 5 Km. Menurut Pengelola Bumdes saat dilakukan FGD (Fokus Group Discussion) pada saat terjadi penutupan TPST Piyungan, kalurahan Tegaltirto menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak akibat penumpukan sampah yang tidak terorganisir dan tidak terkelola dengan baik seperti bau tidak sedap, penumpukan sampah di TPS dan juga penumpukan sampah di beberapa titik wilayah Kalurahan Tegaltirto. . Secara Luas wilayah kerja Kalurahan Tegaltirto secara keseluruhan adalah 620.595,5 ha. Penduduk Kalurahan Tegaltirto adalah 12.766 orang yang terdiri dari 4.277 Kepala Keluarga (BPS, 2022) [4].

Permasalahan sampah domestik dapat menjadi perhatian dalam bidang ekonomi BUMDes Tegaltirto. Masyarakat sudah sering diberikan sosialisasi tentang membuang sampah yang baik dan benar, tetapi sulit untuk mengaplikasikannya. Salah satu contohnya masyarakat belum melakukan pemilahan sampah organik dan non organik dalam pengelolaan sampah. Beberapa warga ada yang memilih untuk membakar sendiri sampah rumah tangganya, demi menghindari biaya pungutan sampah per bulan oleh Petugas



pengelola sampah. Ada pula warga yang sembarangan membuang sampah di TPS pedukuhan lain, karena lebih dekat dengan wilayah tinggal mereka.

Meskipun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah telah disusun dan diterapkan di BUMDes Tegaltirto, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Petugas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di 14 pedukuhan masih menghadapi kendala dalam menjalankan SOP secara konsisten, yang menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan sampah, seperti sampah berserakan, bau tidak sedap, dan meningkatnya jumlah alat yang mengganggu warga sekitar TPS. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi SOP tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penilaian ini penting karena pelaksanaan SOP yang efektif akan berdampak langsung pada kebersihan lingkungan serta sistem tata kelola sampah di Desa Tegaltirto dalam jangka Panjang.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah di BUMDes Tegaltirto guna mengetahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

II. METODE PENELITIAN

a. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **deskriptif kualitatif** untuk menilai implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah di BUMDes Tegaltirto. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana SOP telah diterapkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta dampaknya terhadap kebersihan lingkungan. Pendekatan **kualitatif deskriptif** digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan SOP, mengidentifikasi kendala, dan mengevaluasi dampaknya terhadap pengelolaan sampah di Kalurahan Tegaltirto.

b. Populasi dan Sampel

Sampel penelitian ditentukan dengan **purposive sampling**, yaitu memilih responden yang memiliki keterlibatan langsung dalam implementasi SOP. Sampel terdiri dari **40 responden**, yang meliputi; 4 pengelola Bumdes, 5 Petugas Pengelola Sampah, 14 Kepala Dukuh, 6 Kader Pengelolaan Lingkungan, 5 Pamong Desa dan 6 perwakilan masyarakat

c. Teknik Pengumpulan Data :

Pengumpulan data oleh peneliti menggunakan observasi, wawancara pendalam serta FGD (*Focus Group Discussion*)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah di BUMDes Tegaltirto berdasarkan data kuantitatif yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Penilaian dilakukan terhadap tingkat kepatuhan terhadap SOP, kendala yang dihadapi, dampak implementasi terhadap kebersihan lingkungan, serta masukan dari pemangku kepentingan melalui FGD dan wawancara

mendalam. Data yang diperoleh dari 40 responden menunjukkan bahwa meskipun SOP telah diterapkan, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan partisipasi masyarakat, ketersediaan infrastruktur, dan konsistensi penerapan prosedur oleh petugas TPS. Untuk lebih jelasnya, hasil penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

TABLE I. . ASPEK PENILAIAN DALAM IMPLEMENTASI SOP SAMPAH DI TEGALTIRTO

Aspek kepatuhan	Kategori Responden	Jumlah (n=40)	Persentase (%)
a. Pengumpulan Sampah sesuai SOP	Seluruh responden	30	75%
b. Keterlambatan pengiriman	3 Petugas TPS, 5 Kepala Dukuh	10	25%
c. Pemilahan Sampah sesuai SOP	5 Kader Lingkungan, 4 Pengelola BUMDes	16	40%
d. Sampah masih tercampur	8 Petugas TPS, 10 Kepala Dukuh	24	60%
e. Pengangkutan sesuai jadwal	Seluruh responden	28	70%
f. Pengangkutan tidak konsisten	4 Kepala Dukuh, 3 Petugas TPS	12	30%
Kendala dalam Implementasi SOP			
Kurangnya TPS Sesuai Standar	8 kepala dukuh	10	71%
Masyarakat enggan memilah	4 petugas TPS, 10 kepala dukuh	22	55%
Masyarakat membakar sampah	3 kader lingkungan, 4 pamong desa	14	35%
Dampak Implementasi SOP			
Kebersihan meningkat	4 Pengelola BUMDes, 5 Kader Lingkungan	26	65%
Masih ada sampah berserakan	5 Kepala Dukuh, 3 Petugas TPS	14	35%
Temuan dari FGD			
Perlu pengawasan ketat	5 Petugas TPS, 10 Kepala Dukuh	32	*0%
Usulan insentif masyarakat	4 Pengelola BUMDes, 6 Kader Lingkungan	24	60%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SOP pengelolaan sampah di BUMDes Tegaltirto telah berjalan,

tetapi belum optimal dalam beberapa aspek. Kepatuhan terhadap SOP masih bervariasi, terutama dalam pemilahan sampah yang hanya diterapkan oleh **40% responden**, sedangkan **60% lainnya** masih mencampur sampah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SOP telah disosialisasikan, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah. Temuan ini sejalan dengan penelitian **Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Klitren Yogyakarta**, yang menekankan pentingnya pendampingan dalam penyusunan dan implementasi SOP guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Kurangnya pelatihan bagi petugas TPS di Tegaltirto menjadi salah satu kendala utama, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, pendampingan yang lebih intensif diperlukan agar petugas dapat memahami dan menjalankan SOP dengan lebih baik [5]. Selain itu, penelitian mengenai **Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Sampah di Kalurahan Tegaltirto Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)** menunjukkan bahwa pelatihan yang terstruktur dapat meningkatkan kompetensi petugas dalam mengelola sampah sesuai SOP. Studi tersebut mencatat adanya peningkatan pengetahuan sebesar **12,14%** dan sikap sebesar **10,34%** pada petugas pengelola sampah setelah diberikan pelatihan [6]. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas petugas TPS di Tegaltirto sangat diperlukan agar implementasi SOP dapat berjalan lebih optimal. Dari aspek kendala implementasi SOP, keterbatasan infrastruktur menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengelolaan sampah. Dari 14 pedukuhan yang ada, hanya **4 pedukuhan (28,5%)** yang memiliki TPS sesuai standar, sementara **8 kepala dukuh (57%)** menyatakan bahwa wilayah mereka belum memiliki fasilitas pemilahan sampah yang memadai. Selain itu, **55% responden**, terutama dari petugas TPS dan kepala dukuh, menyatakan bahwa masyarakat masih enggan memilah sampah, dan **35% responden** mengaku masih ada warga yang memilih membakar sampah untuk menghindari pungutan bulanan. Kendala lain yang ditemukan adalah kurangnya pelatihan bagi petugas TPS, dengan **50% responden**, termasuk petugas TPS dan kepala dukuh, menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan pelatihan optimal dalam penerapan SOP.

Dari sisi kendala, penelitian ini menemukan bahwa infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah masih menjadi hambatan utama dalam implementasi SOP. Hanya **4 dari 14 pedukuhan (28,5%)** yang memiliki TPS dengan sistem pengelolaan yang baik, sedangkan **57% kepala dukuh** menyatakan bahwa wilayah mereka belum memiliki fasilitas pemilahan sampah yang memadai. Kondisi ini memperburuk efektivitas SOP karena tanpa fasilitas yang mendukung, masyarakat sulit menjalankan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas TPS menjadi tantangan lain, dengan **50% petugas menyatakan belum mendapatkan pelatihan optimal** dalam pengelolaan sampah. Hasil penelitian sebelumnya di Kelurahan Klitren menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam memilah dan mengelola sampah. Namun, di Tegaltirto, partisipasi masyarakat masih rendah, sehingga diperlukan strategi edukasi yang lebih intensif, termasuk

insentif bagi warga yang aktif dalam pemilahan sampah [5]. Selain itu, penelitian mengenai konsep **3R (Reduce, Reuse, Recycle)** dalam pengelolaan sampah menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi volume sampah yang dihasilkan [6]. Namun, di BUMDes Tegaltirto, **60% responden** mengakui bahwa masyarakat belum memilah sampah sesuai kategori yang telah ditetapkan dalam SOP, sehingga menunjukkan bahwa konsep 3R belum sepenuhnya diterapkan. Oleh karena itu, edukasi yang lebih intensif tentang konsep 3R sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami manfaatnya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak implementasi SOP terhadap kebersihan lingkungan telah terlihat di beberapa wilayah, dengan **65% responden** menyatakan kondisi lingkungan membaik setelah SOP diterapkan. Namun, masih ada **35% responden** yang melaporkan adanya masalah sampah berserakan dan bau tidak sedap di beberapa TPS. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kebersihan lingkungan masih bergantung pada efektivitas pengawasan dan audit. Hasil FGD juga menunjukkan bahwa **80% responden** menilai perlunya pengawasan lebih ketat dan audit berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP. Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya evaluasi dan revisi SOP secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi lapangan [5]. Dengan melakukan evaluasi rutin, SOP dapat disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan aktual, sehingga meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Selain itu, kurangnya SOP dalam pengelolaan sampah dapat menyebabkan penumpukan sampah yang tidak terorganisir dan tidak terkelola dengan tepat [6]. Oleh karena itu, dengan mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis, termasuk penguatan regulasi, pengawasan ketat, serta keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan perbaikan SOP, BUMDes Tegaltirto dapat memastikan pengelolaan sampah yang lebih optimal dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

- Penelitian ini menilai implementasi SOP pengelolaan sampah di BUMDes Tegaltirto sebagai dasar tahap pemeliharaan dan audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP telah diterapkan, tetapi masih menghadapi kendala dalam partisipasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan pelatihan petugas TPS.
- Pengelolaan sampah belum optimal karena konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum diterapkan sepenuhnya, serta masih kurangnya pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan SOP. Hal ini menyebabkan sistem pengelolaan sampah tidak selalu berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.
- Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, diperlukan perbaikan infrastruktur, edukasi berkelanjutan bagi masyarakat, serta pengawasan dan audit berkala. Dengan langkah-langkah ini, SOP dapat diterapkan secara optimal guna mendukung kebersihan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

V. SARAN

a. *Terkait implementasi SOP yang belum optimal*

- Perlu Dilakukan Pelatihan Rutin Bagi Petugas TPS Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan Keterampilan Dalam Menjalankan SOP.
- Masyarakat Perlu Diberikan Sosialisasi Yang Lebih Intensif Tentang Pentingnya Pemilahan Dan Pengelolaan Sampah Sesuai SOP.
- Pemerintah Desa Dan Bumdes Dapat Bekerja Sama Dengan Pihak Terkait Untuk Memperkuat Regulasi Dan Kebijakan Yang Mendukung Penerapan SOP Secara Konsisten.

b. *Terkait penerapan konsep 3R dan pengawasan SOP*

- Edukasi tentang konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) harus diperluas melalui program kampanye lingkungan yang melibatkan masyarakat secara aktif.
- Pengelolaan sampah berbasis 3R dapat didukung dengan penyediaan fasilitas pendukung, seperti tempat pemilahan sampah yang lebih memadai.
- Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas sistem pengelolaan sampah

c. *Terkait peningkatan efektivitas pengelolaan sampah*

- Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti penyediaan TPS yang memadai di setiap pedukuhan, harus menjadi prioritas.

- Pemerintah desa dapat menerapkan sistem insentif bagi warga yang aktif dalam pemilahan sampah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat.
- Kolaborasi antara BUMDes, pemerintah, dan organisasi lingkungan perlu diperkuat guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

REFERENCES

- [1] Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (2022). Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- [2] Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (2022). Sumber Sampah Nasional. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>.
- [3] Harian Jogja (2021). Jumlah Sampah Yang Dihasilkan Oleh Kabupaten Sleman Per Tahun. Diambil pada tanggal; 7 Maret 2023 (<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/10/19/512/1085984/fantastis-ini-jumlah-volume-sampah-yang-dihasilkan-sleman-setiap-tahunnya>)
- [4] Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Laporan limbah plastik Indonesia*. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- [5] **Rahmawati, A., & Setyowati, I. (2023).** Pelatihan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan sampah di Kalurahan Tegaltirto berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle). *Community Development Journal (CDJ)*, 5(1), 45–55. Retrieved from <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/28088>.
- [6] **Eliana, D., Yanuari, N. P., Kusuma, R. S., Saputra, R. K., Nugroho, R. P. A., Setyaputri, K. E., & Sulistiyowati, A. (2024).** Pelatihan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan sampah di Kalurahan Tegaltirto berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 4153–4161. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i3.28088>